

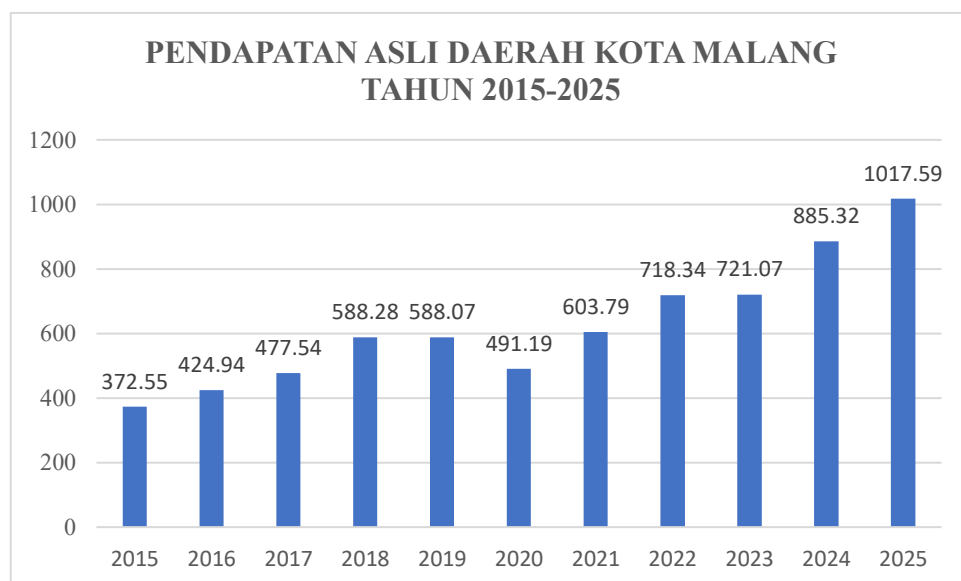
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator utama kemandirian fiskal pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan yang digali di wilayahnya sendiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin leluasa pemerintah daerah menyusun program pembangunan yang sesuai karakteristik ekonomi dan sosial wilayahnya.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2025



Sumber: DJPK Kemenkeu

Dalam struktur PAD, pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting karena menjadi instrumen fiskal yang langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha (Weku et al., 2023). Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan retribusi daerah dipungut sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah. Di antara berbagai jenis pajak dan retribusi tersebut, pajak hotel, pajak restoran, serta berbagai pungutan yang berkaitan dengan jasa pariwisata menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial di kota-kota yang mengandalkan sektor jasa dan wisata.

Sektor pariwisata secara luas diakui sebagai salah satu penggerak penting perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi lokal, dan meningkatkan penerimaan pajak serta retribusi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD terutama mengalir melalui pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang cenderung mengalami tren peningkatan seiring naiknya kunjungan wisatawan dan berkembangnya usaha penunjang pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada pelaku usaha pariwisata secara langsung, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD.

Kota Malang merupakan salah satu destinasi utama di kawasan Malang Raya yang memiliki basis ekonomi jasa dan pariwisata yang berkembang pesat, didukung oleh daya tarik alam, budaya, pendidikan, dan berbagai kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata Kota Malang dilaporkan memberikan kontribusi signifikan terhadap

PAD, dengan capaian yang menembus ratusan miliar rupiah dan menjadi salah satu penopang utama kas daerah melalui berbagai lini usaha terkait wisata seperti hotel, restoran, tempat rekreasi, dan usaha penunjang lainnya. Selain itu, inovasi kebijakan seperti digitalisasi pajak daerah juga dilaporkan mampu mendongkrak penerimaan, misalnya pajak restoran di Kota Malang yang melonjak tajam setelah penerapan sistem digital.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Malang sangat bergantung pada kapasitas dan kinerja sub-sektor penunjang seperti perhotelan dan restoran, karena kedua sektor ini menjadi objek utama pemungutan pajak daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas wisatawan. Jumlah hotel yang tersedia mencerminkan kapasitas kota dalam menampung wisatawan, sementara tarif dan tingkat hunian kamar menjadi dasar perhitungan pajak hotel yang masuk ke PAD. Demikian pula, keberadaan dan penyebaran restoran atau rumah makan menentukan potensi pajak restoran yang dapat digali oleh pemerintah daerah dari konsumsi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Selain aspek ketersediaan sarana akomodasi dan kuliner, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang juga memegang peran sentral dalam mendorong PAD karena setiap kunjungan membawa potensi konsumsi atas berbagai produk dan jasa lokal yang menjadi objek pemungutan pajak. Peningkatan jumlah wisatawan akan memperbesar permintaan terhadap jasa hotel dan restoran, yang pada gilirannya meningkatkan basis pajak hotel dan restoran serta retribusi layanan pariwisata lainnya. Dengan demikian, dinamika jumlah wisatawan berpotensi menjelaskan variasi penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata,

khususnya di kota yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan.

Restoran dan rumah makan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan konsumsi bagi wisatawan dan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu objek penerimaan pajak daerah yang pertumbuhannya cukup pesat di berbagai daerah. Di Kota Malang, penerapan digitalisasi pemungutan pajak dilaporkan mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran secara signifikan hingga mencapai ratusan miliar rupiah, yang menunjukkan besarnya potensi fiskal dari sektor kuliner jika dikelola dengan baik. Pertumbuhan jumlah restoran dan rumah makan di kawasan wisata maupun pusat kota sekaligus mencerminkan berkembangnya ekosistem pariwisata yang dapat memperkuat basis PAD.

Berbagai studi terdahulu di sejumlah daerah menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi yang efektif terhadap peningkatan PAD, namun sebagian besar fokus pada besaran penerimaan pajak dan efektivitas pemungutan, bukan pada karakteristik struktur penawaran dan permintaan seperti jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran sebagai determinan PAD. Beberapa penelitian di Kota Malang juga lebih menekankan hubungan jumlah hotel, tingkat hunian, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel, bukan terhadap PAD secara keseluruhan sehingga aspek keterkaitan langsung antara indikator aktivitas pariwisata dan PAD masih relatif terbatas dibahas. Kondisi ini membuka ruang untuk mengkaji lebih jauh peran indikator-indikator pariwisata tersebut sebagai faktor yang menjelaskan variasi PAD di tingkat kota.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran berperan dalam meningkatkan PAD Kota Malang, khususnya dalam kerangka penguatan kemandirian fiskal daerah berbasis sektor jasa dan pariwisata. Kajian yang memfokuskan pada ketiga variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana aktivitas pariwisata tercermin dalam kinerja PAD, serta menjadi dasar bagi perumusan strategi pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga optimalisasi penerimaan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?
2. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?
3. Apakah jumlah restoran/rumah makan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah restoran/rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Kota Malang sebagai salah satu kota jasa dan pariwisata di Indonesia, dengan ruang lingkup kajian yang dibatasi pada hubungan antara jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran dengan Pendapatan Asli Daerah kota. PAD yang menjadi objek kajian terutama diarahkan pada komponen penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata, khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan penerimaan lain yang relevan, tanpa mengulas secara mendalam seluruh komponen PAD seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, atau pendapatan dari BUMD. Secara temporal, penelitian dapat dibatasi pada periode beberapa tahun terakhir sesuai ketersediaan data resmi, sehingga mampu menangkap dinamika pariwisata Kota Malang pasca penguatan otonomi daerah dan perkembangan digitalisasi pemungutan pajak.

Dari sisi variabel, penelitian ini hanya memasukkan jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran sebagai variabel independen, sementara faktor lain yang juga berpotensi mempengaruhi PAD seperti kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, investasi sektor lain, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dimasukkan secara rinci dalam model. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus analisis pada sektor pariwisata dan usaha penunjangnya, sekaligus menjawab kebutuhan kajian empiris yang secara spesifik menempatkan indikator aktivitas

pariwisata sebagai determinan PAD di tingkat kota. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan mengenai peran struktur pariwisata terhadap PAD, tanpa menafikan keberadaan faktor-faktor lain di luar model penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang selaras dengan upaya peningkatan PAD. Informasi mengenai pengaruh jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran terhadap PAD dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penataan zonasi usaha pariwisata, serta penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pemungutan pajak.

Bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai posisi dan kontribusi sektor mereka terhadap perekonomian daerah, sehingga mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih konstruktif antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lain seperti asosiasi pariwisata, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk memahami pentingnya dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pembangunan ekonomi daerah dan keuangan daerah, khususnya yang mengaitkan teori pertumbuhan yang digerakkan pariwisata (*tourism-led growth*) dengan kinerja PAD. Dengan menempatkan jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran sebagai variabel penjelas PAD, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan model empiris yang menghubungkan indikator struktural sektor pariwisata dengan kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji hubungan antara sektor pariwisata dan PAD di wilayah lain dengan karakteristik berbeda, baik melalui perluasan variabel, perbandingan antar daerah, maupun penggunaan metode analisis yang lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dasar teoritis dan empiris bagi pengembangan kebijakan fiskal dan pembangunan pariwisata di tingkat daerah.